

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketidakadilan sosial adalah isu yang bersifat global dan menjadi halangan utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana terlihat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 1 yang berkaitan dengan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2030 (Nations, 2015). Di tingkat nasional, Indonesia terus menghadapi tingkat kemiskinan yang signifikan, karena Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Maret 2023, persentase populasi miskin adalah 9,36%, setara dengan sekitar 25,90 juta individu, sebagian besar berada di daerah pedesaan (Statistik, 2020). Pemerintah Indonesia telah meluncurkan banyak inisiatif bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Program-program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi populasi yang kurang beruntung; namun, mereka sering kali mendorong ketergantungan jangka panjang, yang dapat menghambat komunitas untuk mencapai kemandirian (Bank, 2020).

Kemiskinan adalah salah satu isu sosial yang masih menghadirkan tantangan serius dalam proses pembangunan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah ini tidak hanya terkait dengan rendahnya penghasilan masyarakat, tetapi juga mencakup kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Dalam kerangka pembangunan saat ini, kemiskinan dilihat sebagai suatu kondisi yang beragam dan dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Menurut Amartya Sen, kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh pendapatan yang rendah, tetapi juga merupakan hilangnya kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat. Sen menegaskan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah akan membatasi kemampuan seseorang dalam mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Menurut para ahli, tingkat ketergantungan pada bantuan sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, yang dapat dianalisis melalui pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan kausal (Bradshaw, 2005), dalam teori ketergantungan struktural (*structural dependency theory*), menekankan bahwa ketergantungan ini bukan hanya hasil dari kemiskinan individu, melainkan struktur sosial-ekonomi yang lebih luas, di mana faktor demografis seperti usia lanjut dan rendahnya pendidikan memperburuk ketergantungan karena membatasi akses terhadap peluang kerja. Ia menyatakan, "*In rural areas, dependency on welfare is exacerbated by demographic vulnerabilities, leading to a cycle where aid becomes a substitute for economic mobility*" (Bradshaw, 2005). Di konteks Indonesia, Amartya Sen (dalam kerangka kapabilitas, 1999) menambahkan bahwa faktor ekonomi seperti pendapatan rendah dan pengangguran musiman mengurangi "kapabilitas" individu untuk mandiri, sehingga bantuan sosial berubah menjadi jebakan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan pemberdayaan. Sen berargumen bahwa "*poverty is not just low income, but a deprivation of basic capabilities, which in turn fosters reliance on external aid*" (Sen, 1999).

Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan berperan penting dalam membentuk ketergantungan terhadap bantuan sosial. Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah umumnya memiliki keterampilan kerja yang terbatas sehingga lebih sulit memperoleh pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan layak. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan dan mendorong ketergantungan pada program bantuan sosial sebagai sumber pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, bantuan sosial seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial jangka pendek, tetapi juga diintegrasikan dengan program pemberdayaan, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses pendidikan dan kesempatan kerja agar penerima mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan secara bertahap keluar dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah (Becker, 1964; OECD, 2023; World Bank, 2022).

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia telah melaksanakan banyak program

perlindungan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif utama yang memberikan transfer tunai bersyarat sebagai dukungan sosial kepada keluarga berpenghasilan rendah. Inisiatif ini memprioritaskan rumah tangga dengan anggota seperti wanita hamil, balita, anak-anak usia sekolah, dan kelompok rentan lainnya yang memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan memfasilitasi akses ke layanan dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, dan gizi. Bersama dengan PKH, ada beberapa program bantuan lainnya, seperti ATENSI (bantuan Rehabilitasi Sosial). Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung populasi rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan komunitas terpinggirkan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup bagi populasi yang terdampak.

Pelaksanaan PKH memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat. Namun, di sisi lain, program bantuan sosial yang diberikan secara terus-menerus juga berpotensi menimbulkan ketergantungan sosial apabila tidak diimbangi dengan program pemberdayaan masyarakat. Menurut (Soetomo), bantuan sosial yang diberikan tanpa disertai pemberdayaan dapat menyebabkan masyarakat kehilangan motivasi untuk mandiri dan cenderung bergantung pada bantuan pemerintah dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan bantuan sosial tidak hanya diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari kemampuan penerima bantuan untuk keluar dari ketergantungan tersebut.

Program bantuan sosial memberikan dampak yang besar pada keadaan sosial ekonomi rumah tangga yang menerima bantuan. Melalui penggunaan metode regresi linier berganda, penelitian ini menemukan bahwa sekitar 67,4% perubahan dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga dapat dijelaskan oleh variasi dalam bantuan sosial yang diterima, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar lingkup penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun faktor-faktor lain

seperti dukungan dari keluarga, tingkat pendidikan, serta akses ke pelatihan dan pemberdayaan masyarakat juga berperan dalam menjamin kemandirian ekonomi dari penerima bantuan. (Wiku, Rotinsulu, dan Walewangko, 2020).

Ketergantungan pada bantuan sosial dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah pendidikan. Pendidikan berfungsi penting dalam meningkatkan kualitas manusia, pemikiran, serta kemampuan individu dalam menghadapi masalah ekonomi dan sosial. Berdasarkan teori Modal Manusia yang diperkenalkan oleh Gary Becker, pendidikan adalah investasi dalam sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan kesempatan kerja seseorang. Orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi biasanya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mencari pekerjaan, mengelola keuangan keluarga, serta memanfaatkan peluang usaha, sehingga lebih mampu mencapai kemandirian secara finansial.

Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi produktif. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat sulit keluar dari kemiskinan dan lebih bergantung pada bantuan sosial pemerintah. Menurut Nana Sudjana, pendidikan tidak hanya berfungsi meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan dan sikap individu agar mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.

Selain pendidikan, akses terhadap pelatihan keterampilan juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat ketergantungan bantuan sosial. Pelatihan keterampilan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan kerja dan produktivitas individu agar mampu bersaing dalam dunia kerja maupun menciptakan usaha mandiri. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, pelatihan adalah suatu proses untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral seseorang agar mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Melalui pelatihan keterampilan, masyarakat diharapkan memperoleh kemampuan praktis yang dapat

digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Teori andragogi yang dikemukakan oleh Malcolm Knowles menjelaskan bahwa pelatihan bagi orang dewasa akan efektif apabila disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan pengalaman peserta. Pelatihan keterampilan yang relevan dapat membantu masyarakat miskin mengembangkan usaha produktif, meningkatkan kreativitas, dan memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, akses pelatihan keterampilan menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan masyarakat penerima bantuan sosial.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terpadat di Indonesia menunjukkan disparitas kemiskinan yang tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Data BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2022 mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan pedesaan mencapai 10,2%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan (8,5%), dengan faktor utama seperti ketergantungan pada sektor pertanian subsisten dan akses terbatas terhadap peluang ekonomi (Barat, 2022)..

Salah satu cara utama yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan adalah bantuan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, tingkat kemiskinan di Kabupaten Majalengka mencapai 12,5%, dengan Desa Jatipamor di Kecamatan Talaga menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap kemiskinan struktural. Berbagai tantangan seperti fluktuasi harga hasil pertanian, bencana alam, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan merupakan kondisi yang umum di Desa Jatipamor, di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian subsisten. Kondisi ini menyebabkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Fenomena ketergantungan bantuan sosial masih banyak ditemukan di wilayah pedesaan, termasuk di Desa Jatipamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Sebagian masyarakat penerima PKH masih menjadikan bantuan sosial sebagai

sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan keterampilan kerja, serta minimnya akses terhadap pelatihan keterampilan yang dapat menunjang kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, terdapat keluarga penerima PKH yang telah menerima bantuan dalam jangka waktu cukup lama namun belum menunjukkan peningkatan kemandirian ekonomi secara signifikan. Sebagian penerima bantuan juga belum aktif mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga terkait. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial belum sepenuhnya mampu mendorong masyarakat keluar dari kondisi ketergantungan.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas bantuan sosial dari aspek kesejahteraan dan efektivitas program, sedangkan penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan akses pelatihan keterampilan terhadap ketergantungan bantuan sosial masih terbatas, khususnya pada masyarakat penerima PKH di Desa Jatipamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan dan akses pelatihan keterampilan memengaruhi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial pada Program Keluarga Harapan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas ketergantungan pada bantuan sosial di Indonesia, namun sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif atau deskriptif. Misalnya, studi dari Kementerian Sosial RI (2019) tentang evaluasi PKH menunjukkan bahwa faktor seperti pendidikan rendah dan kurangnya akses pelatihan meningkatkan ketergantungan, berdasarkan wawancara mendalam dengan penerima di beberapa desa.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan aspek kualitatif, seperti studi kasus atau survei sederhana, tanpa menggunakan metode kuantitatif yang ketat seperti regresi linier untuk mengukur hubungan kausal antara

variabel independen (Pendidikan dan akses Pelatihan Keterampilan) dan dependen (tingkat ketergantungan).

Kecamatan Talaga, sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka dengan populasi pedesaan dominan, menghadapi tantangan serupa dengan 14 desa di bawahnya yang mayoritas bergantung pada pertanian padi dan hortikultura. Data BPS Kecamatan Talaga (2022) mencatat bahwa 55% rumah tangga di kecamatan ini termasuk dalam kelompok miskin, dengan akses terbatas terhadap infrastruktur seperti jalan dan irigasi, yang memperburuk ketergantungan pada bantuan sosial pemerintah. Survei awal di wilayah ini menunjukkan bahwa faktor demografis (seperti usia lanjut dan rendahnya pendidikan) serta faktor ekonomi (seperti pengangguran musiman) menjadi pendorong utama ketergantungan tersebut.

Di Desa Jatipamor, survei awal peneliti pada pertengahan tahun 2025 menemukan bahwa lebih dari setengah rumah tangga penerima bantuan sosial mengalami ketergantungan tinggi, di mana lebih dari setengahnya lagi memiliki pendapatan keluarga yang bergantung pada bantuan tersebut. Faktor seperti usia, jenis kelamin, status pekerjaan, dan kondisi ekonomi rumah tangga diduga memainkan peran signifikan.

Secara keseluruhan, tingginya ketergantungan bantuan sosial di Desa Jatipamor tidak hanya mencerminkan persoalan kemiskinan, tetapi juga lemahnya kapasitas pendidikan, pekerjaan, dan dukungan sosial masyarakat. Sementara penelitian terdahulu cenderung berfokus pada pendekatan deskriptif atau kualitatif, belum banyak studi yang mengukur faktor-faktor penyebab ketergantungan secara empiris melalui analisis kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat Pendidikan dan akses pelatihan keterampilan, terhadap tingkat ketergantungan keluarga penerima PKH di Desa Jatipamor menggunakan analisis regresi. Hasilnya diharapkan dapat memberikan dasar kebijakan berbasis bukti bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pemberdayaan yang lebih efektif guna memutus siklus ketergantungan dan memperkuat kemandirian rumah tangga penerima bantuan.

1.2 Rumusan Masalah

Studi ini menyelidiki apakah tingkat pendidikan dan akses ke pelatihan keterampilan mempengaruhi ketergantungan pada bantuan sosial di antara keluarga yang berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.

1.3 Definisi Operasional

a. Ketergantungan Bantuan Sosial

Secara konseptual, ketergantungan dimaknai sebagai kondisi ketika masyarakat lebih banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah atau pihak lain dibandingkan upaya mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Secara operasional, variabel ini diukur melalui frekuensi penerimaan bantuan, proporsi kebutuhan rumah tangga yang ditopang oleh bantuan sosial, sikap dan persepsi terhadap keberlanjutan bantuan, serta keinginan untuk mencari alternatif pendapatan lain di luar bantuan.

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yang telah diselesaikan oleh responden. Variabel ini diukur berdasarkan kategori SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ sederajat, DIII dan perguruan tinggi.

c. Akses pada Pelatihan Keterampilan

Akses pada pelatihan keterampilan didefinisikan sebagai ketersediaan dan partisipasi komunitas dalam program pelatihan vokasi atau kewirausahaan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait di Desa Jatipamor, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

d. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah upaya bantuan sosial bersyarat yang disponsori pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin atau berisiko dengan memfasilitasi akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan kesejahteraan sosial. Penelitian ini secara operasional mendefinisikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sejenis bantuan sosial yang diberikan

kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, yang terdiri dari bantuan keuangan bersyarat yang dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.

1.4 Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk menilai dampak pencapaian pendidikan dan akses pelatihan keterampilan terhadap ketergantungan pada bantuan sosial di antara keluarga yang berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Pendidikan Masyarakat, khususnya mengenai pemahaman tentang ketergantungan rumah tangga pedesaan terhadap program bantuan sosial.
- 2) Memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara faktor ekonomi, sosial, dan budaya dengan tingkat ketergantungan masyarakat dalam konteks program perlindungan sosial di pedesaan.
- 3) Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji dampak jangka panjang program PKH terhadap perilaku sosial, pola konsumsi, serta motivasi kemandirian masyarakat.
- 4) Menghasilkan model konseptual tentang faktor-faktor ketergantungan yang dapat diuji lebih lanjut dalam penelitian serupa di daerah lain.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Desa dan Dinas Sosial: Memberikan gambaran nyata tentang faktor-faktor penyebab ketergantungan rumah tangga terhadap PKH sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran.
- 2) Bagi Pendamping PKH: Menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam memberikan edukasi kepada penerima bantuan agar lebih termotivasi untuk mandiri secara ekonomi.

- 3) Bagi Masyarakat Penerima PKH: Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya mengurangi ketergantungan pada bantuan dan mendorong pengembangan usaha atau keterampilan produktif.
- 4) Bagi Dunia Akademik: Menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk memperkaya diskusi di bidang pendidikan masyarakat, khususnya terkait strategi pengurangan ketergantungan pada program bantuan social